



BUPATI YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 193 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN SEWA RUMAH DAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan peraturan bupati yahukimo nomor 7 tahun 2018 pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) tentang Penetapan Besaran Tunjangan Sewa Rumah Dan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diatur dan ditetapkan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tunjangan Sewa Rumah Dan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (berita daerah kabupaten yahukimo tahun 2018 nomor 7).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Sewa Rumah Dan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2018;
- KEDUA : Besaran Tunjangan sebagaimana diktum kesatu diatas adalah sebagai berikut :
- a. Tunjangan Sewa Perumahan bagi Ketua DPRD sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan;
 - b. Tunjangan Sewa Perumahan bagi Anggota DPRD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
 - c. Tunjangan Sewa Kendaraan bagi anggota DPRD sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan;
- KETIGA : Besaran Tunjangan Sewa Rumah Dan Transportasi sebagaimana dimaksud hanya di berikan kepada Ketua dan atau anggota DPRD yang tidak memiliki rumah dinas jabatan maupun kendaraan dinas jabatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo melalui DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 31 Oktober 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.196812212003121005

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP